PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSERO

Siti Nurhasanah

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu pedoman tata kelola perusahaan yang baik, adapun isi dari pedoman ini mencakup prinsip-prinsip mengenai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu perusahaan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan BUMN khususnya dalam persero sebagaimana ditegaskan dalam Kep.Men BUMN Nomor 117/M-MBU/2002.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Perusahaan, Persero.*

A. PENDAHULUAN

Istilah GCG pertama kali muncul sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat, hal ini ada setelah terjadi beberapa skandal korporasi dan praktek korupsi dalam perusahaan. Beberapa tindakan penyalahgunaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh para organ perusahaan tidak hanya dapat menyesatkan pemegang saham dalam prospek dan kinerja perusahaan, tetapi juga pihak lain seperti kreditor, pegawai, buruh, dan masyarakat.¹

Good Corporate Governance (GCG) bukanlah sesuatu hal baru dalam manajemen korporasi, tetapi di Indonesia GCG merupakan suatu fenomena baru di dalam tata kelola korporasi, dan ini muncul sejak pasca krisis tahun 1997. Awal GCG di Indonesia diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka *economy recovery* pasca krisis. GCG merupakan konsep mengenai tata cara kelola perusahaan yang sehat, konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Perusahaan dikelola dengan baik adalah perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang, oleh karena itu perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak terkait baik langsung

atau tidak langsung, internal dan eksternal. Adanya GCG dalam perusahaan secara otomatis pengelolaan perusahaan harus memenuhi standar usaha dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen yang telah ditetapkan. Penerapan *corporate governance* di Indonesia terdiri dari 3(tiga) aktivitas, pertama, menetapkan kebijakan nasional; kedua, menyempurnakan kerangka regulasi; ketiga, membangun inisiatif sektor swasta.

Perumusan kebijakan nasional ditandai dengan pembentukan Komite Nasional *Corporate Governance (KNKCG)*. Pembentukan komite kebijakan nasional dilandasi pada Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, dan pertama kali mengeluarkan pedoman GCG. Berkaitan dalam pelaksanaan GCG di dunia usaha, maka pemerintah berinisiatif perlunya GCG disektor publik. Bertolak dari perkembangan GCG pada bulan November 2004 Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan KNKCG, yang terdiri dari sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Salah satu tugas penting Sub-Komite Korporasi adalah menciptakan pedoman bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek GCG pada pemangku kepentingan. Pedoman umum GCG bukan merupakan peraturan perundangan tetapi berisikan hal-hal sangat prinsip yang menjadi landasan bagi perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan kesinambungan

¹Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007. *Good Corporate Governance (Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. hal. 60.

usahanya dalam jangka panjang pada koridor etika bisnis yang berlaku.

Salah satu perusahaan yang telah memiliki pedoman GCG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini terjadi karena fenomena banyaknya tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam perusahaan, penyalahgunaan kekuasaan serta tidak memperhatikan kepentingan perusahaan, sehingga perlu diambil suatu inisiatif perlu adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik. Reformasi pengelolaan perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG di BUMN dipertegas dengan dikeluarkan Surat Keputusan BUMN Nomor. Kep.-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara tertanggal 4 Juni 2002, tindak lanjut dari pembentukan Komite Audit dengan diberlakukan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tertanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara, dan Keputusan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor Kep-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2002.

BUMN sebagai pilar perekonomian Indonesia wajib menjadi pelopor pengimplementasian dari prinsip-prinsip GCG, hal ini dikarenakan BUMN mempunyai peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional dalam dunia usaha. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam KepMen BUMN Nomor 117/2002 terdiri dari 5 (lima) prinsip yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dalam melaksanakan tugasnya setiap organ harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, hal ini tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) KepMen No.117/2002 yang menyatakan bahwa "BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional. Jelas bahwa dalam hal ini diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaan GCG.

Permasalahan yang akan diangkat dari penjelasan di atas, bagaimanakah implementasi

prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Istilah *governance* berasal dari Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian, selanjutnya istilah ini dipergunakan dalam konteks kegiatan dan perusahaan atau jenis organisasi yang lain dikenal dengan nama *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.²

Berdasarkan Pedoman GCG 2006, GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. *Corporate Governance* menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) KepMen BUMN No. 117/2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN didefinisikan yaitu:

"Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika".

Berdasarkan Pasal 1 Huruf (d) KepMen BUMN No.117/2002, *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.

² Siswanto Sutojo dan E. Jhon Aldridge, *Good Corporate Governance. Tata kelola Perusahaan yang Sehat*. PT Damar Mulia Pustaka. Jakarta. hal. 1.

Apabila *stakeholders* kita hubungkan dengan adanya nilai-nilai etika, maka tampak bahwa penerapan GCG harus didasarkan oleh etika dalam arti system nilai yang terdapat dalam diri seseorang atau kelompok, dan sudah tentu kode etik dalam perusahaan perseroan serta dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan diperlukan asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk.

Istilah *corporate governance* pertama kali digunakan pada tahun 1970-an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan berpolitik tidak sehat dan budaya korporasi yang tak terarah bahkan merugikan perekonomian Negara. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi diberbagai Negara, membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya penerapan *corporate governance*, istilah *corporate governance* antara satu Negara dengan Negara lain berbeda-beda akan tetapi perbedaan yang ada tidak mempengaruhi bahwasannya mempunyai inti pengertian yang sama.

Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi terhadap perusahaan untuk menjamin bahwasannya dirinya akan memenuhi semua kewajibannya yang telah dibebankan serta menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.

Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa *corporation governance* merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsure dari struktur perseroan. *Corporate governance* dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif dan bersumber dari budaya perusahaan, etika, system nilai proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan, pengelolaan sumber daya serta resiko

secara efisien dan efektif, pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Ada 3 definisi mengenai *corporation governance*, yang masing-masing diutarakan oleh:

- a. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, menyatakan bahwa: *corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*

OECD menyatakan bahwasannya *corporate governance* adalah system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur mengenai pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholders non-pemegang saham*.³

- b. *The Australian Stock Exchange (ASX)*, menyatakan *corporate governance* adalah: *corporate governance is the system by which companies are directed and managed. It influences how the objectives of the company set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized.*

Corporate governance merupakan system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan kegiatan perusahaan, system ini mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sasaran usaha

³ *Ibid*, hal. 3.

maupun dalam mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Dalam Persero adanya *Good Corporate Governance* dapat mendorong pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya organ persero dalam meningkatkan nilai (*value*) perseroan serta akuntabilitas serta system pengendalian kegiatan usaha bisnis.

- c. Pakar Manajemen Jiil Solomon dan Aris Solomon, definisi *corporate governance* yang dalam buku berjudul "Corporate Governance and Accuntability, kedua pakar manajemen ini mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili *Board of Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan tanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota the stakeholders non-pemegang saham.⁴ Perusahaan harus memerhatikan kepentingan dari *stakeholders* non-pemegang saham dengan menciptakan nilai tambah (*value added*) dari prodak atau jasa dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.

Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Adapun tujuan penerapan *good corporate governance* adalah, sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

- terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional;
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Perusahaan Perseroan (persero) adalah perusahaan milik Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Persero. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PP. No. 12 Thn 1998 dijelaskan bahwa persero adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan bentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkan dimiliki Negara melalui penyertaan modal langsung. Adapun tujuan pendirian Perseroan adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dalam menjalankan kegiatan dan proses pengelolaan perusahaan, persero memiliki organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, direksi, karyawan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang menaungi persero seperti anggaran dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dilandasi dengan adanya suatu mekanisme GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran.

Tugas dan wewenang yang diberikan terhadap organ persero merupakan tanggung jawab yang melahirkan suatu kewajiban dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Implementasi Prinsip-prinsip GCG pada Persero

Pasal 33 UUD'1945 hasil amandemen secara tegas dan jelas menyatakan bahwasannya "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

⁴ *Ibid*, hal, 4.

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia diharapkan selalu berkembang seiring dengan kemajuan jaman, dan implementasi GCG diperlukan dalam memberikan dorongan untuk terciptanya perekonomian yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada. selanjutnya dalam penerapan GCG agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, perlu adanya dukungan dari tiga pilar yang saling berhubungan dan mendukung yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Persero dalam pengelolaan perusahaan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG, hal ini berdasarkan pada pada Keputusan Menteri Keuangan BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN selanjutnya disingkat KepMen BUMN No.117/2002 dan secara khusus diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Prilaku (*Code of Conduct*) yang dikeluarkan oleh Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Nomor: KEB/K/1/2006 dan Nomor: KEB/2/2006 sebagai instrumen dari keluarnya Pedoman GCG BUMN.

Adapun *deskriptor intentions to Good Corporate Governance*, diuraikan di bawah ini.

Prinsip Tranparansi (*Transparency*)

Pasal 3 KepMen BUMN No. 117/2002, menyatakan pengertian mengenai transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi pada Persero, dalam hal ini Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang dalam pelaksanaan suatu keputusan dikuasai oleh pemerintah dibawah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, hal ini tercantum secara jelas dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU BUMN “Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau

badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, dan pada Pasal 5 Ayat (1) PP Persero juga menentukan bahwasannya “Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Jenderal BUMN, perorangan, atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS Persero. Dalam proses pengambilan keputusan baik Menteri Keuangan maupun Menteri BUMN adanya unsur keterbukaan yang tercermin dalam RUPS, selanjutnya hasil RUPS dimuat dalam risalah RUPS atau dimuat ke dalam bentuk keputusan tertulis yang ditandatangani.

Berkaitan dalam proses pengambilan keputusan dapat diambil contoh dalam Surat Keputusan Direksi yang berisi kebijakan dalam rangka pelaksanaan Undag-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan dan Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada risalah rapat Direksi perlu memelihara risalah rapat, hal ini dikarenakan risalah merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dan merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik Direksi, Komisaris, maupun Pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Apabila dilihat pada Pasal 14 UUPT, yang inti dari isi pasal ini adalah dalam proses pengambilan keputusan Menteri bertindak sebagai RUPS, kemudian dalam Pasal 77 UU BUMN menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta RUPS.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam melaksanakan tugas Komisaris/Dewan Pengawas perlu dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan *system review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 67 UU BUMN menjelaskan bahwa setiap BUMN harus memiliki Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala

yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern secara tertulis harus diserahkan Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas memastikan bahwa external auditor maupun internal auditor dan Komite audit memiliki akses informasi mengenai BUMN dalam pelaksanaan tugasnya adanya prinsip transparansi dalam pengaksesan informasi, ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) KepMen No.117/2002, yaitu BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN kepada pemegang saham/pemilik modal, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.

Prinsip Kemandirian

Pasal 3 KepMen BUMN No. 117/2002, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip kemandirian terwujud dalam hal bahwa anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai, (a) Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, BUMS, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; (b) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan atau (c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan perundang-undangan. Larangan perangkap jabatan ini dimaksudkan untuk para anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perseroan serta menghindari timbulnya benturan kepentingan, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UUPT yaitu Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal ini agar terciptanya suatu suasana yang kondusif dalam melakukan setiap kegiatan pengelolaan perusahaan yang mana telah tercantum dalam UU BUMN serta KepMen No. 117/2002.

Prinsip kemandirian dapat terlihat pula dalam komposisi Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan harus efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independent, dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi. Hal ini sesuai dengan tugas Dewan Komisaris yang tercantum dalam Pasal 108 UUPT Ayat (1), yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam membina hubungan bisnis dengan relasi/mitra kerja Perseroan terdapat tindakan-tindakan yang tidak dapat dihindari seperti pemberian dan/atau penerimaan hadiah, imbalan, cinderamata, maupun jamuan bisnis, dalam hal ini diperlukan suatu mekanisme dan saluran resmi yang stabil dengan *good governance* sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penting dalam menjalankan usaha perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisi/Dewan Pengawas membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Ayat (5) KepMen No. 117/2002, yaitu bertugas membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi, eksternal auditor, secara tidak langsung Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Menurut Pedoman GCG yang dikeluarkan oleh KNKG, tugas dan wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut: (a) mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai; (b) meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan; (c) mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal audit; (d)

mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor.

Selanjutnya menurut KepMen BUMN No. 103/2002, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut; (a) menilai pelaksanaan audit dan hasilnya; (b) memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan; (c) system pengendalian manajemen perusahaan dan pelaksanaannya; (d) memastikan telah terdapat prosedur review yang memadai terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN; (e) mengidentifikasi hal-hal yang perlu perhatian dari komisaris atau dewan pengurus; (f) melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris.

Pelaksanaan prinsip kemandirian akan menjelaskan dan mempertegas kembali bahwasannya ada tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit dalam pengelolaan perusahaan secara efisien, efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independent dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas memastikan keefektifitasan dari pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

Prinsip Akuntabilitas

Pasal 3 KepMen BUMN No. 117/2002 menyatakan bahwa yang dimaksud prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjaawaban organ setiap pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Organ perseroan terdiri dari RUPS, Komisaris, Direksi, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola perusahaan dituntut untuk selalu searah dan seimbang dengan penuh tanggung jawab, di dalam implementasi prinsip akuntabilitas terwujud dalam kejelasan fungsi dan kewenangan dari setiap organ, yang secara garis besar berlandaskan pada UU PT, UU BUMN, PP Persero dan KepMen BUMN No. 117/2002.

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan /atau anggaran dasar, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (13) UU BUMN, dalam Pasal Ayat (4) UUPT memberikan pengertian sama mengenai RUPS, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 UU BUMN menyatakan bahwa Menteri dapat memberikan dengan hak substitusi kepada

perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam RUPS, pihak yang menerima kuasa harus mendapat persetujuan dari Menteri untuk mengambil keputusan mengenai; (a) perubahan jumlah modal; (b) perubahan anggaran dasar; (c) rencana penggunaan laba; (d) penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan serta pembubaran Persero; (e) investasi dan pembiayaan jangka panjang; (f) kerjasama Persero; (g) pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; (h) pengalihan aktiva. Dari hal ini tertera bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dapat terwujud dari RUPS, disamping RUPS Pemegang Saham/Pemilik modal tergambar adanya implementasi dari prinsip akuntabilitas yaitu tidak diperkenankannya mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Persero dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang atas jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan mengawasi tindakan serta memberikan nasihat kepada Direksi jika dipandang perlu. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melakukan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala. Dewan Komisaris menetapkan tata tertib rapat, risalah rapat harus dibuat dengan mencantumkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) para peserta rapat. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses informasi secara tepat waktu dan lengkap, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima. Dewan Komisaris harus menentukan sistem transparan untuk pengangkatan para eksekutif dan penilaian kinerja eksekutif, disamping itu juga Dewan Komisaris mempertimbangkan pembentukan komite nominasi untuk seleksi dan pengangkatan eksekutif, komite remunerasi untuk menyusun system pengkajian dan pemberian tunjangan serta fasilitas lain dalam perseroan dan komite audit yang anggotanya berasal dari anggota Dewan

Komisaris guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen agar dapat menjalankan tugasnya secara mandiri dan kritis. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perseroan, selain gaji, tunjangan, dan kompensasi saham yang diterima sebagai anggota Direksi berdasarkan RUPS. Rapat Direksi dilakukan secara berkala dengan menetapkan tata tertib rapat, dan risalah rapat harus mencantumkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari peserta rapat. Direksi juga menetapkan suatu system pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset persero. Direksi wajib memberitahukan Komite Audit apabila Direksi memerlukan pendapat kedua (*second opinion*) mengenai masalah akuntansi yang penting, selanjutnya Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas oleh Komisaris pada persero memiliki tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, tugas dan wewenang dan kewajiban Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Persero, dan berdasarkan Anggaran Dasar Persero Direksi bertanggung jawab memberikan informasi seperti memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.

Prinsip Pertanggungjawaban

Pasal 3 KepMen BUMN No. 117/2002, menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang,

menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, tanggungjawab lingkungan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Berkaitan dengan adanya tanggungjawab sosial dan lingkungan, di dalam Pasal 1 UU PT dijelaskan bahwa tanggungjawab social dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggungjawab social dan lingkungan merupakan ketentuan yang baru diatur dalam UUPT, Tanggungjawab Sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan trend global seiring dengan semaraknya kepedulian mengutamakan stakeholders dan ini tidak terlepas dari prinsip GCG yang menerapkan prinsip *fairness, transparency* dan *accountability*⁵. Gagasan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja tapi juga perusahaan memperhatikan dampak social dan lingkungan (*triple bottom line*), dan sudah menjadi fakta bahwasannya bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul dipermukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan.

Prinsip pertanggungjaawaban dalam persero yang lebih ditekankan adalah harus berpegang teguh pada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab baik kepada stakeholders maupun terhadap masyarakat, selain itu dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan stakeholders harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu UU PT, UU BUMN, PP, dan KepMen No. 117/2002 Tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. Adanya kesesuaian terhadap tata kelola perusahaan yang

⁵Jamin Ginting, 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 94.

mengarah pada GCG yang memuat prinsip-prinsip GCG dibuktikan dengan dikeluarkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code Of Corporate Governance*) dan Pedoman Prilaku (*Code Of Conduct*) yang telah dibuat secara bersama-sama dengan Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan bersama Komisaris dan Direksi Nomor KEB/K/1/2006 dan Nomor KEB/2/2006 sebagai instrument dari dikeluarkannya pedoman GCG BUMN.

Dalam pelaksanaan prinsip GCG dapat terlihat dari pengawasan pelaksanaan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan oleh Direksi yang dilaksanakan oleh Komisaris melalui Komite Audit, dan perlu diketahui pula bahwa seluruh saham pada persero masih 100% milik pemerintah ini dilandasi pada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dan perseroan terbatas dalam hal seluruhnya tidak dikuasai atau dimiliki oleh Negara.

Prinsip Kewajaran

Pasal 3 KepMen No. 117/2002 menyatakan bahwa prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran dapat diwujudkan antara dengan membuat membuat peraturan kepentingan minoritas, membuat *corporate conduct* dan/atau kebijakan kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan baik orang dalam, *self dialing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk didalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*) dan mengedepankan *equal job opportunity*.

Pasal 30 UU BUMN menjelaskan bahwa Direksi harus memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latarbelakang etnik seseorang atau khusus lainnya yang lindungi oleh peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang, dan ini melahirkan suatu pedoman tata kelola perusahaan)

dan pedoman prilaku dalam hal terwujudnya keadilan untuk menghormati hak-hak *stakeholders* serta untuk mewujudkan *good governance* yang berfungsi sebagai pedoman bagi insan pekerja dalam melakukan interaksi dengan *stakeholders*.

Pedoman Prilaku ini secara khusus dibuat dengan mengedepankan kejujuran, perilaku etis, dan pencegahan terjadi tindakan pelanggaran, dan pelanggaran terhadap pedoman merupakan tindakan indisipliner sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperseroan. disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang dilingkungan pekerja dan dinyakini mempunyai pengaruh positif untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif sebagai pencapaian visi dan misi *Perseroan.Code of Conduct* memiliki sistematika yaitu nilai-nilai luhur, menguraikan sifat-sifat, keyakinan, pemahaman, perbuatan, tradisi, kebiasaan yang baik dan berkembang dalam perseroan; komitmen prilaku, menguraikan tekad yang kuat dari segala tindakan berinteraksi dengan sesama manusia maupun perseroan; pelaksanaan pedoman perilaku, menguraikan mekanisme penanganan permasalahan.

Nilai-nilai yang telah dikodifikasi memerlukan proses internalisasi melalui sosialisasi dan simulasi yang berkelanjutan sehingga dapat menyatu menjadi suatu budaya perseroan, yang secara otomatis mempunyai peranan penting dalam upaya untuk mewujudkan tujuan perseroan sehingga seluruh insan perseroan dari Komisaris, Direksi sampai pegawai paling rendah wajib memahami dan menghayati dengan sungguh-sungguh, hal ini akan menimbulkan suatu prinsip kewajaran antar insane persero dengan menyadari adanya hubungan yang baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan antara atasan dan bawahan serta sesama rekan kerja akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat.

C. PENUTUP

Implementasi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabiliti, pertanggungjawaban, kewajaran yang tercantum dalam KepMen No. 117/2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN (dalam Persero) dan didukung dengan UU PT, UU BUMN dan PP

Persero merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang secara khusus diatur dalam *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* sebagai instrumen penerapan *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, Jamin. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance (pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum)*. Kreasi Total Media. Yogyakarta.

Muhammad Abdulkadir. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia (Cetakan Ketiga Revisi)* Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sutojo, Siswanto dan E. Jhon Aldridge. 2008. *Good Corporate Governance. Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. PT Damar Mulia Pustaka. Jakarta.